

**REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS : STUDI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI
DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU
RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:

YOSIA PUTRA NABABAN
NIT. 21303815

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

In an effort to realize Sustainable Development Goals in Pematang Tujuh Village, Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency through a land redistribution program and community land empowerment. According to the Directorate of Community Land Empowerment, there are SDGs that can be realized through agrarian reform, including SDGs 1 No Poverty (income, assets and accessibility to basic services); SDGs 2 No Hunger (food security and sustainable agriculture); SDGs 8 Decent Work and Economic Growth (Employment opportunities and business diversification); SDGs 17 Partnerships to Achieve Goals.

The research method applied is descriptive qualitative with a case study approach (land redistribution and community land empowerment). The data analysis used is data reduction used to summarize observation data, interview data and literature study data which results in preliminary data conclusions, SWOT analysis to evaluate strengths, weaknesses, opportunities, and threats and Fishbone analysis used to describe the root of the problem.

SDG 1 No Poverty can be realized based on analysis showing an increase in the income of land redistribution beneficiaries (range Rp2,433,000-Rp2,600,500) as well as efforts to diversify businesses and increase access to basic services such as roads and bridges. However, there are still gaps that need to be addressed through intervention strategies; SDGs 2 No Hunger is very difficult to realize because there are obstacles that prevent leading to the achievement of SDGs 2 such as commodity shifts, dependence on chemicals, dependence on middlemen and failure of organic farming certification. SDGs 8 Decent Work and Economic Growth are difficult to realize due to limited skills and further education, constraints on market access and promotion, constraints on sustainable assistance and SDGs 17 Partnerships to achieve Goals are constrained by BUMDes operations, limited information and facilitation of land registration procedures.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
INTI SARI	VIII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Reforma Agraria.....	12
2. Penataan Aset dan Penataan Akses.....	14
3. Sustainable Development Goals (SGDs).....	17
4. Keberhasilan Pelaksanaan Keberlanjutan di Tingkat Desa.....	20
5. Relevansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).....	21
6. Pengentasan Kemiskinan.....	24

7. Ketahanan Pangan	25
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	26
9. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	27
B. Kerangka Pemikiran	28
C. Pertanyaan Penelitian.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Format Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
1. Jenis dan Sumber Data	34
2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan.....	36
E. Validitas Pengambilan Data	36
F. Definisi Operasional Variabel	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV PROFIL DESA: SEJARAH, GEOGRAFI, MASYARAKAT, DAN USAHA	
DESA PEMATANG TUJUH.....	44
A. Sejarah Desa Pematang Tujuh.....	44
B. Kondisi Geografis Desa Pematang Tujuh.....	45
C. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Desa Pematang Tujuh	45
1. Jumlah Penduduk Desa Pematang Tujuh menurut Usia	46
2. Jumlah Penduduk Desa Pematang Tujuh menurut Tingkat Pendidikan	47
3. Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Pematang Tujuh.....	48
D. Potret UMKM	49
BAB V PROBLEM SDGS DAN PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI	
DESA PEMATANG TUJUH.....	51
A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di	
Kabupaten Kubu Raya.....	51
1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah	51
2. Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Pematang Tujuh.....	54

3. Model Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Pematang Tujuh	58
a) Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Pematang Tujuh	58
b) Program Pelatihan di Desa Pematang Tujuh dari Instansi Lain	61
B. Kondisi Empirik/Problem SDGs di Desa Pematang Tujuh.....	62
1. Kondisi Pendapatan, Aset dan Akses di Desa Pematang Tujuh.....	64
2. Kondisi Ketahanan Pangan di Desa Pematang Tujuh.....	81
3. Kondisi Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	92
4. Kondisi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat di Desa Pematang Tujuh	97
C. Analisis SWOT Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat.....	105
1. Analisis Kekuatan-Peluang (S-O Strategy).....	106
2. Analisis Kelemahan-Peluang (W-O Strategy).....	106
3. Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T Strategy)	107
4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T Strategy).....	107
D. Analisis Diagram Fishbone Pelaksanaan Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat	107
BAB VI PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Rekomendasi	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
DAFTAR LAMPIRAN	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat 'baru' yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah Pemberdayaan Tanah Masyarakat lainnya untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya (Bachriadi, dkk., 1997; David, 1974; Dorner, 1972; Fao, 1981; Herring, 1983; Jr & M., 2004; Lehmann, 1974; Linn, 1970; Prosterman & Riedinger, 1987; Putzel, 1992; Rodriguez, 1978; Senior, 1958; Sobhan, 1993; Tuma, 1965). Dalam perspektif yuridis, historis dan tujuan reforma agraria diharapkan menuju suatu susunan masyarakat yang adil, menghindari keresahan dan gejolak politik, optimalisasi alokasi sumberdaya sedemikian rupa sehingga lebih efisien, membangun basis ekonomi pertanian yang kuat, memberdayakan rakyat tani, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan jaminan hukum hak-hak atas tanah, dan tanggung jawab produksi dan sebagainya (Wiradi, 2009).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, reforma agraria memiliki 3 inti permasalahan yang perlu diatasi, yaitu ketimpangan, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah (Humas, 2020). Kurangnya akses masyarakat dalam penguasaan lahan di Indonesia menjadi permasalahan yang disebabkan oleh tekanan perusahaan besar serta kurang meratanya distribusi penguasaan lahan terhadap masyarakat. Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah, yaitu melalui program reforma agraria meliputi pemetaan sosial, penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan, pendampingan dan penyuluhan peningkatan kapasitas masyarakat, pendataan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang terbentuk, wadah dan dukungan informasi pasar, teknologi yang memadai, akses pembiayaan dan penyiapan pasca panen (Marroli, 2017). Disisi lain, program redistribusi tanah saja tentu belum cukup efektif, sehingga perlu didukung dengan penyediaan akses bagi masyarakat khususnya subyek reforma agraria berupa penyediaan sarana prasarana berupa infrastruktur, pendampingan, pasar, permodalan, teknologi dan lainnya, dengan harapan masyarakat sebagai subyek reforma agraria tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga manfaat dari program pemerintah dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdiri dari penataan aset dan pemberian akses (Herrayani dkk., 2019). Oleh sebab itu, penataan aset dan pemberian akses menjadi kesatuan dalam keberhasilan program reforma agraria.

Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni melalui reforma agraria, namun dalam pelaksanaannya tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam beberapa publikasi mengatakan bahwa pelaksanaan penataan akses dinilai belum optimal dan belum terlaksana secara efektif yang disebabkan beberapa masalah, seperti ego sektoral kelembagaan, kurang adanya komitmen dalam pelaksanaan, tidak ada anggaran tersedia dalam pelaksanaan (Manurung & Yamin, 2024; Trinanda Putra dkk., 2021). Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan reforma mencegah terwujudnya SDGs dikarenakan Menurut Teori Enemark (2005), bahwa "*Sustainable development is not attainable without sound land administration*" yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dicapai tanpa administrasi pertanahan yang baik. Dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang baik tentunya membutuhkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mengelola informasi pertanahan tanpa melihat ego sektoral kelembagaan. Oleh sebab itu, peneliti meneliti Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Desa Pematang Tujuh yang telah disahkan menjadi Desa Reforma sebagai bukti bahwa pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Pematang Tujuh tersebut telah berhasil. Keberhasilan ini membuktikan bahwa program reforma agraria pada desa Pematang Tujuh mampu mengatasi permasalahan umum pada pelaksanaan reforma agraria, seperti ego sektoral kelembagaan, kurangnya anggaran hingga komitmen yang kuat dalam

pelaksanaan. Pelaksanaan reforma agraria sendiri sejalan dengan administrasi pertanahan yang mencakup penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan (Amanita & Septiansyah, 2020) sehingga mampu mewujudkan SDGs.

Desa Pematang Tujuh menjadi penting untuk diteliti dalam rangka memahami lebih dalam strategi dan model pelaksanaan program, melakukan identifikasi unsur-unsur yang menjadi dukungan yang berpotensi dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Pematang Tujuh sebagai rangka mendukung pembangunan Desa yang sejalan dengan visi misi dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Disisi lain, terdapat peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Pematang Tujuh yang pada awalnya tahun 2021 dengan skor IDM hanya 0,7086 dengan status desa maju meningkat menjadi 0,8492 dengan status menjadi Desa Mandiri pada tahun 2023, hal ini dibuktikan dengan pelaporan Data Kalimantan Barat dan Laporan Sistem Informasi Desa yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes). Tentunya peneliti tertarik mengenai Pelaksanaan Redistribusi tanah yang didukung Pemberdayaan Tanah Masyarakat memiliki dampak dalam peningkatan IDM Desa Pematang Tujuh. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan bermaksud untuk menggali lebih dalam riwayat pelaksanaan Redistribusi Tanah yang didukung Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Pematang Tujuh hingga mencapai Desa Reforma yang berperan dalam mewujudkan SDGs melalui Pemberdayaan Tanah Masyarakat, maka judul yang diangkat, yaitu “Redistribusi Tanah dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) : Studi Implementasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan Redistribusi tanah kepada masyarakat saja menjadi kurang efektif tanpa didampingi program-program pemberdayaan tanah masyarakat, hal tersebut tentunya mencegah terwujudnya SDGs. Penyelesaian permasalahan ini menjadi penting bagi pelaksana program reforma agraria sehingga dapat memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta sebagai evaluasi bagi pelaksana dalam meningkatkan keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi serta mempercepat pembaharuan dan implementasi SDGs. Program Redistribusi dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Pematang Tujuh, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat merupakan inti penelitian untuk mengetahui serta memahami langkah, kondisi, serta mengidentifikasi indikator yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang selaras pembangunan SDGs tingkat desa yang dinilai relevan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada SDGs (1) tanpa kemiskinan melalui penataan aset yang tepat seperti pelaksanaan redistribusi tanah, memberikan dukungan berupa pemberdayaan, SDGs (2) tanpa kemiskinan melalui ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, SDGs (8) pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi, peningkatan kompetensi serta jalur pasar sehingga dapat menciptakan peluang kerja dan usaha serta SDGs (17) kemitraan untuk mencapai tujuan melalui kerjasama antarlembaga melalui GTRA tingkat daerah hingga pusat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat dalam mewujudkan SDGs di Desa Pematang Tujuh.
- b. Mengkaji dan menganalisis dampak Redistribusi Tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat dalam mewujudkan tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan di Desa Pematang Tujuh, Kabupaten Kubu Raya;
- c. Mengkaji dan menganalisis dampak Redistribusi Tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat dalam mewujudkan tujuan SDGs (2) tanpa kelaparan di Desa Pematang Tujuh, Kabupaten Kubu Raya;
- d. Mengkaji dan menganalisis dampak Redistribusi Tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat dalam mewujudkan tujuan SDGs (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Desa Pematang Tujuh, Kabupaten Kubu Raya;
- e. Mengkaji dan menganalisis dampak Redistribusi Tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat dalam mewujudkan tujuan SDGs (17) kemitraan untuk mencapai tujuan di Desa Pematang Tujuh, Kabupaten Kubu Raya;

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang proses reforma agraria dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan reforma agraria hingga membentuk desa reforma.
- b. Bagi Kementerian ATR/BPN diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam pelaksanaan reforma agraria serta melihat gambaran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terdapat dalam reforma agraria sehingga memaksimalkan program yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui program tersebut.

- c. Bagi dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, hasil penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi mengenai keadaan fisik, sosial, ekonomi masyarakat desa, sehingga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kerangka kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan.
- d. Bagi masyarakat dan pemerintahan Desa Pematang Tujuh, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan tindakan dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi desa dengan optimal.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk menegaskan keaslian penelitian ini yang disajikan dalam *Tabel 1*

Tabel 1. Perbandingan penelitian dengan penelitian terdahulu

No.	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian d. Jenis Penelitian e. Perguruan Tinggi	Tujuan	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	a. Amalia Arofah Puji Sopyan (2023) b. Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam Mendukung Sustainable Development Goals; Studi Implementasi Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Wisata Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor c. Metode Kualitatif-Deskriptif d. Skripsi e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	1. Mengetahui riwayat implementasi PTM (penataan akses) di Desa Purwabakti, termasuk strategi dan model yang digunakan 2. Menganalisis potensi kegiatan PTM SDGs (tanpa kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.	1. penentuan model pemberdayaan berupa sistem pertanian terintegrasi yang berkolaborasi dengan 9 lembaga/instansi melalui 18 rencana program. Strategi pembangunan gotong royong diharapkan membentuk kemandirian masyarakat melalui potensi pertanian dan UMKM. 2. Program PTM yang dilaksanakan belum sepenuhnya relevan, program pemberdayaan tersebut hanya relevan untuk menjawab dua tujuan SDGs, yaitu kemitraan dan pengentasan kemiskinan.	1. Persamaan penelitian ini adalah ingin mengetahui relevansi SDGs melalui pemberdayaan tanah masyarakat. 2. Perbedaannya dalam penelitian ini berada di lokasi dan Study case pelaksanaan masih pada tahun pertama.
2.	a. Rifaldi Tri Akbar (2024) b. Evaluasi Pelaksanaan Program <i>Sustainable Development Goals</i>	1. Mengetahui evaluasi Pelaksanaan program <i>Sustainable Development Goals</i>	1. Pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan melalui bantuan modal kepada masyarakat pelaku	1. Persamaan penelitian ini adalah ingin mengetahui efektivitas program

	(SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng c. Metode Kualitatif-Deskriptif d. Skripsi e. Universitas Muhammadiyah Makassar	(SDGs) dalam upaya menghapus/menanggulangi kemiskinan di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.	UMKM, serta bantuan Pemerintah Pusat seperti PKH dan BLT bagi masyarakat kurang mampu dan dukungan Instansi Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha UMKM dapat membantu perekonomian masyarakat di Desa Bonto Salluang.	pemberdayaan masyarakat mampu mengentaskan kemiskinan (SDGs 1) 2. Perbedaan dalam Rumusan Masalah, penelitian ini hanya berfokus kepada SDGs 1 dan implementasi pelaksanaan Program hanya melalui Pemberian bantuan Modal.
3.	a. Sari Puspariningtyas (2021) b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Sumberurip Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar c. Metode Kualitatif-Deskriptif d. Skripsi e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	1. Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar telah berkontribusi memberdayakan masyarakat 2. Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat desa.	1. Pelaksanaan redistribusi tanah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, namun tidak besar karena adanya salah sasaran dalam pemberian <i>akses reform</i>. 2. Pelaksanaan redistribusi tanah berjalan sesuai target dalam pelaksanaan di lapangan namun terdapat beberapa hambatan dan kendala, namun dapat teratasi. Manfaat pasca pelaksanaan redistribusi tanah telah dirasakan seluruh masyarakat dengan meningkatnya perekonomian penduduk desa.	1. Persamaan penelitian ini adalah ingin mengetahui manfaat pelaksanaan redistribusi melalui pemberdayaan masyarakat pasca selesainya pelaksanaan redistribusi tanah. 2. Perbedaan penelitian terletak di rumusan masalah penelitian.

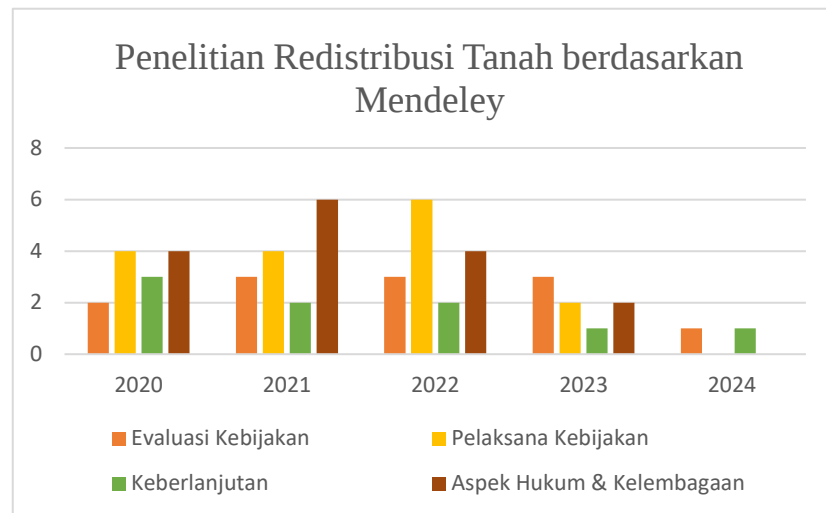
4.	a. Fika Furi Mareta (2024) b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kampung SDGs di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember c. Metode Kualitatif-Deskriptif d. Skripsi e. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	1. Mengetahui model pemberdayaan masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember 2. Mengetahui pembangunan ekonomi berbasis kampung SDGs	1. Model pemberdayaan masyarakat menerapkan sistem 4 bina, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina lembaga. Berdasarkan model pemberdayaan yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, usaha, lingkungan, dan lembaga. 2. Peningkatan pembangunan ekonomi di Kampung SDGs dikarenakan beberapa faktor salah satunya telah terealisasinya 8 tujuan Kampung SDGs, selain itu dipengaruhi oleh produktivitas serta kreatifitas masyarakat dari segi usaha sehingga dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang masih menganggur.	1. Persamaan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana model serta strategi pemberdayaan masyarakat dapat mewujudkan kampung/desa SDGs. 2. Perbedaan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah yaitu, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak melalui Redistribusi tanah.
5.	a. Muhammad Frisky Alfafa (2024) b. Analisis Dampak Pelaksanaan Reforma Agraria terhadap Struktur Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat di Desa Candi,	1. Mengetahui dampak reforma agraria terhadap struktur ekonomi 2. Mengetahui dampak program reforma agraria terhadap pendapatan	1. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang signifikan dari reforma agraria terhadap struktur ekonomi melalui program penataan akses.	1. Persamaan penelitian ini adalah ingin mengetahui dampak dari pemberdayaan tanah masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

	Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang c. Metode Mix-Method d. Skripsi e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	masyarakat Desa Candi.	2. Dampak program tersebut meliputi pergeseran dari buruh tani menjadi petani mandiri, menurunnya mobilitas tenaga kerja ke luar desa, berkurangnya ketergantungan pada buruh tani, terciptanya keanekaragaman petani.	2. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus rumusan masalah penelitian ini berfokus kepada struktur ekonomi masyarakat.
6.	a. Yosia Putra Nababan (2025) b. Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> : Studi Implementasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya c. Metode Kualitatif Deskriptif d. Skripsi e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	1. Mengkaji dan menganalisis dampak pelaksanaan Redistribusi Tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat dalam mewujudkan tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan, SDGs (2) tanpa kelaparan, SDGs (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan SDGs (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.	-	1. Persamaan Penelitian ini, yaitu ingin mengetahui dampak dari pemberdayaan tanah masyarakat. 2. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus rumusan masalah yang berfokus dari penataan aset (redistribusi tanah) hingga penataan aset (pemberdayaan tanah masyarakat) yang keduanya saling berintegrasi dalam mewujudkan SDGs.

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 1 di atas, penelitian ini memiliki aspek kebaharuan yang signifikan, yaitu dengan melakukan pengambilan studi kasus pada Desa yang telah berhasil dalam pelaksanaan reforma agraria yang dibuktikan dengan disahkannya Desa Pematang Tujuh menjadi Desa Reforma Agraria yang menjadi lokasi penelitian. Selain itu, penelitian mengenai “Redistribusi tanah” yang

mewujudkan keberlanjutan masih jarang ditemui, hal tersebut dibuktikan dengan diagram berikut :



Gambar 1. Tingkat Penelitian “Redistribusi Tanah” Berdasarkan Mendeley
Sumber : Mendeley, (2025)

Dalam Gambar 1, peneliti melakukan pendataan mengenai total penelitian yang berkaitan dengan redistribusi tanah dengan melakukan searching pada mendeley dengan kata kunci “Redistribusi Tanah” maka terdapat 13 penelitian pada tahun 2020, 12 penelitian pada tahun 2021, 16 penelitian pada tahun 2022, 2 penelitian pada tahun 2024 yang telah dirangkum pada Gambar 1 dan dilakukan pengklasifikasian berdasarkan fokus, tujuan dan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh, yaitu terdapat 9 penelitian mengenai keberlanjutan 5 tahun terakhir pada situs mendeley. Penelitian tersebut tidak membahas secara detail mengenai keberhasilan keberlanjutan dan hanya menyinggung 1 dari sekian banyak indikator keberlanjutan. Perbedaan lainnya pada penelitian sebelumnya, yaitu Integrasi penataan Aset (redistribusi tanah) dengan penataan akses (pemberdayaan tanah masyarakat), lokasi studi yang memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dan objek yang diteliti, yaitu pada Desa Pematang Tujuh sudah menjadi Desa Reforma Agraria

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan studi yang ditemukan di lapangan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, di antaranya:

1. Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya di Desa Pematang Tujuh ditetapkan karena di Desa Pematang Tujuh memiliki beragam aneka produk UMKM. Redistribusi tanah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan 100 KK sebagai penerima redistribusi tanah, sedangkan penerima program penataan akses (pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran). Permodelan Pemberdayaan Tanah Masyarakat yang digunakan, yaitu PTM berbasis kemitraan (*Partnership*) dan PTM berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkolaborasi dengan 6 dinas melalui 7 program yang terlaksana.
2. Program redistribusi tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat belum sepenuhnya relevan menuju dan mengarah pada tujuan SDGs, Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian yang menggambarkan bahwa redistribusi tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat ini hanya relevan menjawab satu tujuan, yaitu SDGs 1 pengentasan kemiskinan. Sementara untuk program redistribusi tanah dan PTM sendiri belum mampu mewujudkan atau mengarah ke tujuan SDGs 2 tanpa kelaparan (ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan), SDGs 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (kesempatan kerja dan diversifikasi usaha) serta SDGs 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan (Kelembagaan dan partisipasi masyarakat).
 - a) SDGs (1) Tanpa Kemiskinan mampu diwujudkan dari program redistribusi tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat. Peningkatan pendapatan terjadi sebelum program rata-rata Rp.2.4300.000 menjadi rata-rata pendapatan Rp. 2.600.500. Segi aset, peluang masyarakat meningkat dilihat

dari antusias masyarakat membuat SKU. Segi Akses, akses dilakukan perbaikan jalan dan jembatan sehingga memudahkan masyarakat untuk mencapai layanan dasar.

- b) SDGs (2) Tanpa Kelaparan sangat sulit untuk diwujudkan, hal ini disebabkan gagalnya petani di Pematang Tujuh mengikuti Sertifikasi Pertanian Organik dari Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik (LeSOS) yang disebabkan oleh prosedur yang sangat berat hingga tidak terdapat pasar untuk menampung hasil panen dan banyak terjadinya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh geografis tanah di Desa Pematang Tujuh menyebabkan tanaman padi tidak dapat dimaksimalkan.
- c) SDGs (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi sangat sulit untuk diwujudkan, karena indikator yang menjadi ukuran adalah kesempatan kerja dan diversifikasi usaha. Kesempatan kerja di desa Pematang Tujuh tercipta saat banyaknya permintaan Produk UMKM atau saat musim Panen Sayur-sayuran maupun panen sawit. Namun, permintaan untuk produk UMKM sangat minim, bahkan hanya tersedia melalui permintaan yang tidak menentu, sehingga pelaku UMKM tidak bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
- d) SDGs (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan sangat sulit untuk diwujudkan. Kemitraan memperhatikan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat, terdapat beberapa kelembagaan desa, seperti PKK, Gapoktan dan lainnya. Namun, tidak adanya BUMDes menjadi kelemahan karena tidak tersedianya organisasi yang dapat menjalin kerja sama terkait pemasaran, perluasan kerja sama antar pihak hingga simpan-pinjam yang dapat dipercaya, BUMDes juga seharusnya sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada pemerintah Desa. sehingga tidak terdapat wadah yang cukup bagi masyarakat untuk berperan aktif dan kurangnya perluasan kesempatan pasar dengan pihak lain.

B. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi legalitas aset dan akses modal, yaitu pemerintah desa bersama insatansi terkait melakukan pendampingan teknis bagi masyarakat penerima manfaat agar semakin berani mengakses KUR dan memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan untuk dapat dikelola sebagai modal usaha dalam penguatan usaha.
2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Penguatan Ketahanan pangan bersama pemerintah desa yang diharapkan dapat tegas dalam merumuskan masalah tentang mengendalikan alih fungsi lahan dan didukung dengan pendampingan kepada masyarakat agar dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan komoditas pangan yang cocok dengan kondisi geografis Desa Pematang Tujuh.
3. Pengembangan pertanian berkelanjutan perlu adanya kerja sama lintas sektor termasuk pemerintah daerah, swasta, dan lembaga pemasaran agar hasil pertanian organik memiliki pasar yang jelas serta didukung dengan bantuan biara produksi diperlukan guna meringankan beban petani.
4. Pemberdayaan UMKM dan Akses Pasar, perlunya pembentukan dan penguatan BUMDes untuk memperluas kerjasama kemitraan, seperti stakeholder terkait pengadaan pelatihan praktik kewirausahaan guna meningkatkan keterampilan pengemasan, serta pemasaran digital. Pembentukan BUMDes juga diharapkan dapat menjalin kerjasama untuk membuka jalur distribusi produk UMKM agar memiliki permintaan yang berkelanjutan.
5. Perlunya ada monitoring dan evaluasi terjadwal agar mengukur keefektivitasan dan keberlanjutan dari program yang diberikan, sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai sasaran dan memiliki dampak yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliyeni, Sihaholo, M., & Sita, R. (2021). Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3), 433–449. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.834>
- Agustiani, N., Sujinah, S., & Hikmah, Z. M. (2019). Kesesuaian Ketinggian Tempat terhadap Penerapan Sistem Tanam Legowo untuk Peningkatan Produksi Padi. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 2(3), 145. <https://doi.org/10.21082/jpptp.v2n3.2018.p145-153>
- Ahmad Rizal, D. (2018). Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 343. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-07>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Amanita, A., & Septiansyah, B. (2020). Penataan Sistem Informasi Dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan Di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria. *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 143–164. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.313>
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif*, 21(2), 83. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>
- Arti kata mitra - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved February 20, 2025, from <https://kbbi.web.id/mitra>
- Arwati, S. (2018). *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Inti Mediatama.
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Abdullah, L. H. (2020). The Nexus Between Zakat and Poverty Reduction, Is the Effective Utilization of Zakat Necessary for Achieving SDGs: A Multidimensional Poverty Index Approach. In *Asian Social Work and Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/aswp.12212>
- Bachriadi, D., Faryadi, E., & Setiawan, B. (1997). *Reforma Agraria Perubahan Politik, Sengketa, Dan Agenda Pembaharuan Agraria Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95870-5_300217
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2017). The Sustainable Development Goals and the Systems

- Approach to Sustainability. In *Economics the Open-Access Open-Assessment E-Journal*. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2017-28>
- Barthos, B. (1990). *Manajemen Sumber daya manusia : suatu pendekatan makro*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Chen, M., Huang, X., Cheng, J., Tang, Z., & Huang, G. (2023). Urbanization and Vulnerable Employment: Empirical Evidence From 163 Countries in 1991–2019. In *Cities*. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104208>
- Creswell, J. w. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar , 2013. <https://pustakapelajar.co.id/buku/research-design-pendekatan-kualitatif-kuantitatif-dan-mixed/>
- David, L. (1974). *Agrarian Reform and Agrarian Reformism. Studies of Peru, Chile, China and India*. London: Faber & Faber.
- Desa, P. (2022). *Sejarah Desa - Desa Pematang Tujuh*. <https://pematangtujuh.desa.id/index.php/artikel/2022/5/10/sejarah-des>
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority of the State in Land Tenure: Redistribution of Land to the People). In *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>
- Dorner, P. (1972). *Land Reform and Economic Development*. Penguin Books. <https://books.google.co.id/books?id=hIrkABc1cL8C>
- Eang, M. L., Clarke, A., & Ordonez-Ponce, E. (2022). The Roles of Multinational Enterprises in Implementing the United Nations Sustainable Development Goals at the Local Level. In *BRQ Business Research Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/23409444221140912>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *Kamus inggris - indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Eliana, E. (2019). Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Adat Baduy. *Pamulang Law Review*, 2(2), 111–118. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5428>
- Enemark, S. (2005). Understanding the Land Management Paradigm. *FIG Commission 7 Symposium On Innovative Technologies for Land Administration, July 2005*, 1–13.
- Fao. (1981). *The Peasants' Charter : the Declaration of Principles and Programme of Action of the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development*. v, 35 p. <http://digitallibrary.un.org/record/1135>
- Feodora, E. I., Bakhtiar, A., & Mazwan, M. Z. (2024). Hubungan Ekspor Pinang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat. *Jurnal Agribest*, 8, 17–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/agribest.v8i1.1661>
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>

- Fonseca, L., Domingues, P., & Dima, A. M. (2020). Mapping the Sustainable Development Goals Relationships. In *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12083359>
- Food and Agriculture Organization. (2002). *Bab 2. Ketahanan pangan: konsep dan pengukuran*[21]. <https://www.fao.org/4/y4671e/y4671e06.htm#TopOfPage>
- Gaol, C. I. L., Manalu, J., & Rumahorbo, B. T. (2022). Strategi Pengembangan Program Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dengan Model Desa Binaan Dan Kemitraan Konservasi Di Cagar Alam Pegunungan Cycloop. In *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapasiasia.vol8.iss2.369>
- Gaspersz, V. (2002). *Total quality management (TQM)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ghimire, K. (2001). *Land Reform and Peasant Livelihoods*. ITDG Publishing (December 15, 2001).
- Habibi, M., & Pratama, D. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs). In *Journal of Government Science (Govsci) Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.15>
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2015). Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003–2013). In *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-1044-0>
- Harland, J. S., Didi, L., & Abiddin, Z. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Penerima Sertifikat Tanah Melalui Program Kredit Usaha Tani Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 164–173. <https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1048>
- Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis – where are we now? *Journal of Strategy and Management*, 3(3), 215–251. <https://doi.org/10.1108/17554251011064837>
- Herdiansyah, D., & Ichsan. (2018). Pkm Bagi Kelompok Tani Nanas Dan Kelompok Pkk Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *TEKNOLOGI PANGAN: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 9(2), 161–164. <https://doi.org/10.35891/tp.v9i2.1201>
- Herlon, M., Khairunnas, K., Ridho, Z., & ... (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal ...*, 109–122. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/agr/article/view/16351%0Ahttps://journal.unilak.ac.id/index.php/agr/article/download/16351/5473>
- Hermawan, D., Akbar, G. G., & Ulumudin, A. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut). In *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.52434/jp.v12i2.2>
- Hermawan, L. (2015). Dilema Diversifikasi Produk: Meningkatkan Pendapatan Atau Menimbulkan Kanibalisme Produk? *Jurnal Studi Manajemen*, 9(2), 142–153.

- Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 286.
- Herring, R. J. (1983). *Land to the Tiller: The Political Economy of Agrarian Reform in South Asia*. Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt2250wd6>
- Hestina, J. (2011). Ketahanan Pangan. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Hidayat, A. D. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Papatung Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>
- Hidayat, B. A., Yuliana, E., Wicaksono, B., Matara, K., Afriyanni, A., Wulandari, S. N., Amri, N. H., & Saksono, H. (2021). *Objectives of Sustainable Development and Analysis of People's Economy Improvement*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.030>
- Hidayati, A., & Adinegoro, K. R. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” melalui program sertifikasi hak atas tanah di kabupaten Sinjai. *Tunas Agraria*, 5(3), 223–237. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.192>
- Hjalmarsson, R., & Lochner, L. (2012). The Impact of Education on Crime: International Evidence. *CESifo Dice Report, Journal for Institutional Comparisons*, 10.
- Humas. (2020). *Reforma Agraria dalam RPJMN*. https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjm/#_ftn1
- ILO. (2018). Kerja Layak dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kantor Jakarta: ILO, 3. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_451904.pdf
- Isnaeni, D. (2018). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317>
- Jr, B., & M., S. (2004). *Rethinking Redistributive Land Reform: Struggles for Land and Power in the Philippines*. Shaker Publishing, Maastricht.
- Junarto, R., & Salim, M. N. (2022). Strategi Membangun Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia. In *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181>
- Kementerian ATR/BPN. (2025). *Peta Interaktif BHUMI ATR/BPN*. <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta?bbox=109.17703278214816%2C-0.27081726688432184%2C109.33669350353483%2C-0.191985434844824&height=632&width=1280&x=363&y=252&latitude=-0.22341843243796689&longitude=109.22231156485316>
- Khalila, N. R. A. B. M., Sagar, S. A. L. S., & Basar, M. F. (2024). An Overarching Summary of the Sustainable Development Goals (SDGs). In *International Journal of Research*

- Kuswidanti. (2008). *Gambaran Kemitraan Lintas sektor dan Organisasi*. 12–32.
- Lagiman. (2020). Pertanian Berkelanjutan : Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. *Porsiding Seminar Nasional* , 365–381.
- Lehmann, D. (Ed. . (1974). *Agrarian reform and agrarian reformism*. Faber and Faber.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Linn, S. (1970). Readings in land reform. In *TA - TT -*. [University of Hartford]. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/136965>
- Mahela, & Sutanto, A. (2006). Kajian Konsep Ketahanan Pangan. *Jurnal Protein*, 13, 194–202.
- Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Manurung, S., & Yamin, M. (2024). *Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai*. 6(4), 12705–12714.
- Marroli. (2017). *Langkah Percepatan Reforma Agraria*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/9489/langkah-percepatan-reforma-agraria/0/artikel_gpr
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>
- Masuda, Y. J., Kelly, A. C., Robinson, B. E., Holland, M. B., Bedford, C., Childress, M., Game, E. T., Ginsburg, C., Hilhorst, T., Lawry, S. W., Miteva, D. A., Musengezi, J., Naughton-Treves, L., Sunderlin, W. D., & Veit, P. (2020). How do practitioners characterize land tenure security? *Conservation Science and Practice*, 2(5), 1–9. <https://doi.org/10.1111/csp2.186>
- Matias, N.-G. (2010). Catchment Residents-Based SWOT Analysis of a Reservoir Ecosystem for Sustainable Water Management: A Case Study From the Region of Alentejo, Portugal. *Water Quality Research Journal*, 45(3), 295–306. <https://doi.org/10.2166/wqrj.2010.032>
- Medeiros, E. (2020). The Territorial Dimension of the United Nations Sustainable Development Goals. In *Area*. <https://doi.org/10.1111/area.12681>
- Megasari, L. A. (2019). *Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*. 1–19.
- Mendeley. (2025). *Redistribusi Tanah* | Mendeley. [https://www.mendeley.com/search/?dgcid=md_homepage&page=1&query=Redistribusi Tanah&sortBy=relevance](https://www.mendeley.com/search/?dgcid=md_homepage&page=1&query=Redistribusi+Tanah&sortBy=relevance)

- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mukaromah, Z. F. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sebagai Bagian Dari Reforma Agraria (Studi Kasus Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Ilmiah Ilmu Hukum*, 29 Nomor 2(2), 1–9. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/21604/16181>
- Mutaqien, A., & Rahardja, M. D. (2006). *Menuju Indonesia sejahtera : upaya konkret pengentasan kemiskinan*. Jakarta : Khanata, Pustaka LP3ES. <https://doi.org/9793330465>
- Nasional, D. P. T. M. D. J. P. A. K. A. dan T. R. P. (2023). *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023*.
- Noriko, N., Wijihastuti, R. S., Mandjusri, A., & Mailani, L. (2023). Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM): Konservasi Tanah dan Air serta E-Commerce di Kampung Cibeureum Sukanagalih Cianjur. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.36722/jpm.v6i1.2417>
- Nurfadilah, K. A. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, Dan Pendidikan Geografi*, 1(2), 15–16. <https://docplayer.info/51763593-Strategi-pengembangan-pariwisata-pantai-pangandaran-studi-kasus-di-kabupaten-pangandaran-skripsi-oleh-khairunisa-afsari-nurfadilah.html>
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). *Cendekia Niaga*, 7(1), 85–96. <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.792>
- Prabawanti, B. E., & Rusli, M. S. (2022). The Role of Social Support for Women Entrepreneurs in Reducing Conflict to Increase Business Performance. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 8(2), 263–273. <https://doi.org/10.17358/ijbe.8.2.263>
- Pranoto, A. R., & Yusuf, D. (2016). Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarij aya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.22146/jsp.13094>
- Prosterman, R. L., & Riedinger, J. M. (1987). *Land Reform and Democratic Development*. Johns Hopkins University Press. <https://books.google.co.id/books?id=DJ2FAAAIAAJ>
- Purnomo, N. H. (2018). KETAHANAN PANGAN. https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/geofish/file/3cc374d0-ffba-4d84-a806-c3cd38746424.pdf
- Putra, A. S. (2013). Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. *Jurnal Nasional PARIWISATA*, 5(3), 189–200.
- Putra, I. U., & Satrianto, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peluang Tenaga Kerja Sumatera Barat Melakukan Migrasi Ulang Alik. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 919. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7719>
- Putri, A. P., & Dhewanto, W. (2022). The Effect of Entrepreneurial Factors on the Realization

- of Sustainable Development Goals (SDG) and Sustainability in Indonesia's SMEs. In *Binus Business Review*. <https://doi.org/10.21512/bbr.v13i3.8524>
- Putri, S. Y. (2021). Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia. In *Jurnal Pir Power in International Relations*. <https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.163-174>
- Putzel, J. (1992). *A Captive Land: The Politics of Agrarian Reform in the Philippines*. Ateneo de Manila University Press. https://books.google.co.id/books?id=N_LsAAAAMAAJ
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*.
- Rahardjo, S. (2016). *Produktif di Usia Produktif* (B. Hendroyono (Ed.)). Jakarta : Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal. In *Jurnal Minfo Polgan*. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Rara, B., Sizi, C., & Munir, U. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 6(2), 2020. <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v6i2.57>:<https://ulr.unizar.ac.id/ulr/index>
- Robinson, B. E., Masuda, Y. J., Kelly, A., Holland, M. B., Bedford, C., Childress, M., Fletschner, D., Game, E. T., Ginsburg, C., Hilhorst, T., Lawry, S., Miteva, D. A., Musengezi, J., Naughton-Treves, L., Nolte, C., Sunderlin, W. D., & Veit, P. (2018). Incorporating Land Tenure Security into Conservation. *Conservation Letters*, 11(2), 1–12. <https://doi.org/10.1111/conl.12383>
- Rodriguez, J. I. (1978). *Genuine agrarian reform*. URM-NCCP.
- Ruttan, V. W., & Hayami, Y. (1984). Toward a Theory Of Induced Institutional Innovation. In *Minneapolis: Centre for Economic Research, Departement of Economic, University of Minnesota*.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Saleh, A. R., Hasan, M., Nurdiana, Inanna, & Tuti, S. (2022). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA HARGA JUALBELI SAYURAN DI PASAR CAKKE KECAMATAN ANGGERAJAKABUPATEN ENREKANG. 55–63.
- Saraswati, Y. (2023). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sumberejo. *Jurnal KIRANA*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.19184/jkrn.v4i2.41286>
- Satriawan, P. W., Hanim, F., Karunia, A. D., & Jamroni, M. (2023). Studi Inovasi Kampung Flory Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Flory, Kec.

- Sleman). In *Jurnal Kirana*. <https://doi.org/10.19184/jkrm.v4i1.36969>
- Scheyvens, R., Banks, G., & Hughes, E. D. (2016). The Private Sector and the SDGs: The Need to Move Beyond 'Business as Usual.' In *Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1002/sd.1623>
- Senior, C. O. (1958). *Land Reform and Democracy*. University of Florida Press. <https://books.google.co.id/books?id=JAZgAAAAIAAJ>
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. In *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74>
- Siregar, F. ahmad. (2023). Pengembangan Sistem Petanian Berkelanjutan Untuk Mencapai Keberlanjutan Pangan. *Jurnal Universitas Medan Area*, 1–11.
- Sobhan, R. (1993). Agrarian reform and social transformation: preconditions for development. In *TA - TT -*. Zed Books. <https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/27144478>
- Soetrisno. (1997). *Konsep dan Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Repelita VII*.
- Solihah, R., Mustofa, M. U., & Witianti, S. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial Di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Dharmakarya*, 11(3), 183. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i3.24953>
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwenty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran Dari Gugus Tugas Reforma Agraria Di Bangka Tengah. In *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Staff, F. (2021). *Laporan Hasil Pemetaan Sosial Desa Pematang Tujuh 2021*.
- Staff, F. (2023). *Laporan Akhir Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran*.
- Statistik, B. P. (2010). *Profil Kemiskinan*. 34, 1–6.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhardjo. (1996). *Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga*.
- Suherman, S., & Imran, M. A. (2020). Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. In *Indonesian Journal of Society Engagement*. <https://doi.org/10.33753/ijse.v1i1.8>

- Sulastri, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(2), 252–265. [http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap-1_06-17-16-06-39-36\).pdf](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap-1_06-17-16-06-39-36).pdf)
- Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sumodinigrat, G., & Nuggroho, R. (2005). *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Suroto. (2000). *Strategi pembangunan dan perencanaan kesempatan kerja*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press 1992. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=36439>
- Surya Wira, Arya Salman, Abimanyu Aziz, Rofi Wahanisa, & Muhammad Adymas. (2024). Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa. *Journal Customary Law*, 2(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3376>
- Sutarto. (1995). *Dasar-dasar organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 1995. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=59166>
- Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). *Bps*, 1–172.
- Teknis, P. (2024). *Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2024*.
- Tenrisau, A. (2021). *BASIC LAND MANAGEMENT IN SUSTAINABLE AGRARIAN MANAGEMENT SYSTEM*. 103–112.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Togatorop, W. I. A., & Setyono, J. S. (2021). The Role of Supreme Audit Institution in Supporting Sustainable Development Goals Implementation: A Study in Indonesia. In *The Indonesian Journal of Planning and Development*. <https://doi.org/10.14710/ijpd.6.2.76-89>
- Tremblay, D., Fortier, F., Boucher, J., Riffon, O., & Villeneuve, C. (2020). Sustainable Development Goal Interactions: An Analysis Based on the Five Pillars of the 2030 Agenda. In *Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1002/sd.2107>
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Tuma, E. H. (1965). *Twenty-six Centuries of Agrarian Reform: A Comparative Analysis*. University of California Press, 1965. <https://www.ucpress.edu/books/twenty-six-centuries-of-agrarian-reform/epub-pdf>

- Utomo, D. L., Mulyanto, B., & Panuju, D. R. (2025). Kondisi Struktur Agraria dan Modal Penghidupan: Studi Kasus Pasca Reforma Agraria di Desa Sumberklampok. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 181–194. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.90050>
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Industry and Higher Education*, 3(1), 202–213. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Wiguna, M., Hardi, H., Hariyani, E., & Safitri, D. (2023). Implementasi Green Accounting Dan Internal Corporate Governance Strength, Terhadap Sustainable Development: CSR Sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.35143/jakb.v16i2.5931>
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir (Edisi Revisi)*. 172.
- Yuwana, S. I. P. (2022). Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) Di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso. In *Sasambo Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>
- Zioło, M., Bąk, I., & Cheba, K. (2020). The Role of Sustainable Finance in Achieving Sustainable Development Goals: Does It Work? In *Technological and Economic Development of Economy*. <https://doi.org/10.3846/tede.2020.13863>

Peraturan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023